

REFORMINER INSTITUTE USULKAN KEBIJAKAN HARGA BBM SUBSIDI BERFLUKTUASI

Permasalahan klasik subsidi BBM memerlukan kebijakan dan langkah terobosan yang tak hanya rasional, implementatif dan efektif di dalam penyelesaiannya untuk masa saat ini (operasional-jangka pendek), tetapi juga untuk jangka waktu yang terus menerus (berorientasi masa depan). Kebijakan pembatasan BBM yang diwacanakan pemerintah selama ini memang cukup rasional, tetapi potensi distorsinya (khususnya terjadinya penyalahgunaan dan pasar gelap BBM) sangat tinggi sehingga tidak implementatif dan tidak efektif di dalam menyelesaikan masalah yang ada baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Kebijakan kenaikan harga BBM yang hanya dilakukan pada saat APBN terancam jebol – seperti yang dilakukan pemerintah selama ini – cukup rasional, implementatif, dan efektif untuk mengatasi permasalahan untuk jangka pendek, tetapi tidak untuk jangka panjang karena kebijakan ini bersifat *ad hoc*. Terbukti, setiap kali terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia – seperti halnya saat ini –, APBN kembali tertekan oleh penambahan defisit karena membengkaknya subsidi BBM dan subsidi energi lainnya (LPG dan listrik). Berangkat dari hal itu, **ReforMiner Institute mengusulkan untuk diterapkannya kebijakan harga BBM subsidi yang berfluktuasi.**

Secara prinsip, kebijakan ini pada dasarnya adalah mengunci persentase harga harga BBM subsidi terhadap harga keekonomiannya pada tingkat tertentu dan membiarkannya mengikuti pergerakan harga minyak mentah yang ada. Jadi, pada saat harga minyak mentah naik harga BBM yang diberlakukan juga akan naik, dan sebaliknya, pada saat harga minyak mentah turun harga BBM juga akan turun. Namun, baik pada saat naik ataupun turun, harga BBM tersebut tetap merupakan harga BBM yang disubsidi dengan besaran persentase tertentu yang dijaga konstan. Besaran persentase ini adalah angka yang akan dijaga konstan sepanjang tahun anggaran berjalan karena pada dasarnya mencerminkan komitmen/keputusan politik dari negara untuk memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya dalam bentuk subsidi harga dengan besaran alokasi anggaran tertentu. Fluktuasi/penyesuaian harga BBM yang berlaku dapat dilakukan sekali atau dua kali dalam satu bulan.

Dalam pandangan ReforMiner Insititute ada tiga hal penting yang menjadi tujuan utama dari diterapkannya kebijakan harga BBM subsidi berfluktuasi ini: (1) agar kita, dan APBN khususnya, dapat terbebas dari permasalahan klasik subsidi BBM yang diakibatkan oleh gejolak/tingginya harga minyak. (2) bahkan, agar kita sebagai negara produsen minyak dapat mulai menikmati *windfall* ketika harga minyak meningkat/tinggi. Semakin tinggi harga minyak, semakin besar *windfall* yang akan kita dapatkan. Jadi, tidak seperti saat ini dimana ketika harga minyak tinggi, APBN selalu mengalami tekanan. (3) agar perekonomian negara ini secara keseluruhan (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas) terbiasa dengan harga BBM yang bergerak naik turun - karena secara alamiah perekonomian yang sesungguhnya memang demikian adanya -, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika perekonomian yang terjadi sepanjang waktu.

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran subsidi BBM pada suatu tahun anggaran tertentu pada kondisi dasar (sesuai asumsi-asumsi makro APBN) selalu akan menghasilkan besaran persentase tertentu harga BBM subsidi terhadap harga keekonomiannya. Untuk APBN tahun 2011, pada kondisi dasar, dari kajian ReforMiner Institute angka-angka persentase itu adalah 65,59% untuk premium, 64,31% untuk solar, dan 36,41% untuk minyak tanah. Artinya, dengan harga premium Rp. 4.500 per liter, solar Rp. 4.500 per liter, dan minyak tanah Rp. 2.500 per liter saat ini, negara mensubsidi masing-masingnya sebesar 34,41%, 35,69%, dan 63,59%.

Persentase harga BBM subsidi dan harga keekonomiannya sebesar 65,59% (premium), 64,31% (solar) dan 36,41% (minyak tanah) inilah yang akan dijaga konstan (paling tidak) sepanjang tahun anggaran 2011 ini berjalan jika kebijakan harga BBM subsidi berfluktuasi ini diterapkan. Namun, karena asumsi-asumsi makro APBN 2011, khususnya harga minyak mentah, saat ini tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada (kondisi dasar tidak sesuai asumsi makro), dan harga BBM subsidi dalam kurun waktu hingga saat ini belum mengalami penyesuaian, kondisi dasar yang akan menjadi acuan/basis perhitungan perlu disesuaikan terlebih dahulu.

Dengan mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price, ICP*) saat ini adalah 100 dolar AS/barel sementara asumsi-asumsi makro APBN lainnya (kurs, *lifting*) masih dianggap tetap (terpenuhi), kajian ReforMiner Institute menghitung bahwa persentase harga BBM subsidi terhadap harga keekonomiannya saat ini hanya mencapai 53,57% untuk premium, 52,50% untuk solar dan 29,70% untuk minyak tanah. Kondisi ini jika dipertahankan akan memberikan dampak negatif terhadap APBN (menambah defisit) jika harga minyak mentah dunia terus meningkat. Untuk itu, sebagai langkah awal di dalam mengimplementasikan kebijakan BBM subsidi berfluktuasi ini diperlukan penyesuaian (kenaikan) harga BBM terlebih dahulu. Penyesuaian ini diperlukan untuk membuat agar APBN tetap dapat bersifat positif-netral (tidak menambah defisit) terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia.

Kajian ReforMiner Institute menghitung penyesuaian harga BBM yang diperlukan pada titik harga minyak mentah (ICP) 100 dolar per barel masing-masing adalah menjadi Rp. 5.510 per liter untuk premium, Rp. 5.512 per liter untuk solar, dan Rp. 3.065 per liter untuk minyak tanah. Ini akan menjadi titik awal untuk kemudian kebijakan harga BBM subsidi berfluktuasi dapat diterapkan. Artinya, jika di dalam perjalanannya kemudian ICP ternyata lebih rendah daripada 100 dolar AS per barel, maka harga BBM subsidi harus diturunkan, dan sebaliknya. Dengan penguatan kurs Rupiah dan perubahan asumsi makro APBN lainnya (yang mestinya dapat dituangkan ke dalam APBN perubahan nantinya), penyesuaian harga yang akan dipilih sebagai titik awal ini dapat menjadi lebih rendah, katakanlah menjadi hanya Rp. 5.000 per liter untuk premium dan solar, dan Rp. 2.750 per liter untuk minyak tanah, sehingga relatif tidak terlalu memberatkan masyarakat.

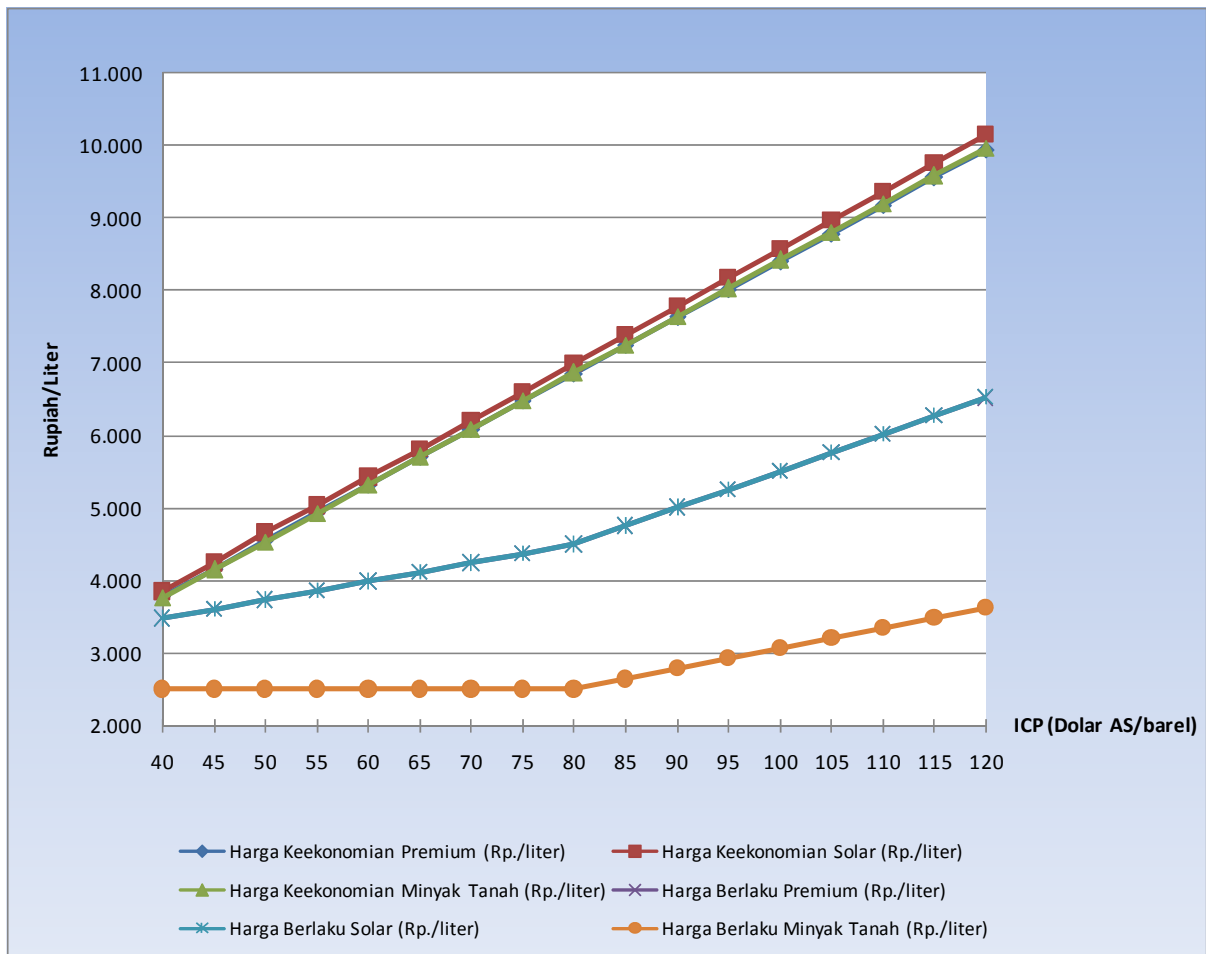
Hasil perhitungan ReforMiner Institute selengkapnya tentang pergerakan ICP dan dampaknya terhadap harga keekonomian BBM, harga BBM subsidi berlaku, besaran perubahan subsidi BBM dan besaran perubahan penerimaan migas untuk tahun anggaran 2011 jika kebijakan harga BBM subsidi berfluktuasi diterapkan (dengan tanpa adanya perubahan asumsi makro APBN 2011) dapat dilihat pada tabel berikut.

ICP (dolar AS/barel)	Harga Keekonomian Premium (Rp./liter)	Harga Keekonomian Solar (Rp./liter)	Harga Keekonomian Minyak Tanah (Rp./liter)	Harga Berlaku Premium (Rp./liter)	Harga Berlaku Solar (Rp./liter)	Harga Berlaku Minyak Tanah (Rp./liter)	Perubahan Penerimaan Migas (Rp. Triliun)	Perubahan Subsidi Energi + DBH Migas (Rp.)
40	3.781	3.849	3.764	3.473	3.473	2.500	-103,53	-103,53
45	4.165	4.242	4.152	3.602	3.602	2.500	-90,59	-90,59
50	4.550	4.663	4.530	3.729	3.729	2.500	-77,65	-77,65
55	4.935	5.030	4.928	3.858	3.858	2.500	-64,71	-64,71
60	5.320	5.422	5.316	3.986	3.986	2.500	-51,77	-51,77
65	5.705	5.816	5.703	4.115	4.115	2.500	-38,83	-38,83
70	6.089	6.209	6.091	4.242	4.242	2.500	-25,88	-25,88
75	6.475	6.604	6.479	4.369	4.369	2.500	-12,94	-12,94
80	6.860	6.996	6.867	4.500	4.500	2.500	0,00	0,00
85	7.245	7.391	7.254	4.752	4.753	2.641	12,94	8,81
90	7.629	7.784	7.642	5.004	5.006	2.783	25,88	17,63
95	8.015	8.178	8.030	5.257	5.259	2.924	38,83	26,44
100	8.400	8.571	8.418	5.510	5.512	3.065	51,77	35,25
105	8.785	8.965	8.806	5.762	5.765	3.206	64,71	44,07
110	9.169	9.358	9.193	6.014	6.018	3.347	77,65	52,88
115	9.555	9.752	9.582	6.267	6.271	3.489	90,59	61,69
120	9.940	10.146	9.970	6.520	6.525	3.630	103,53	70,50

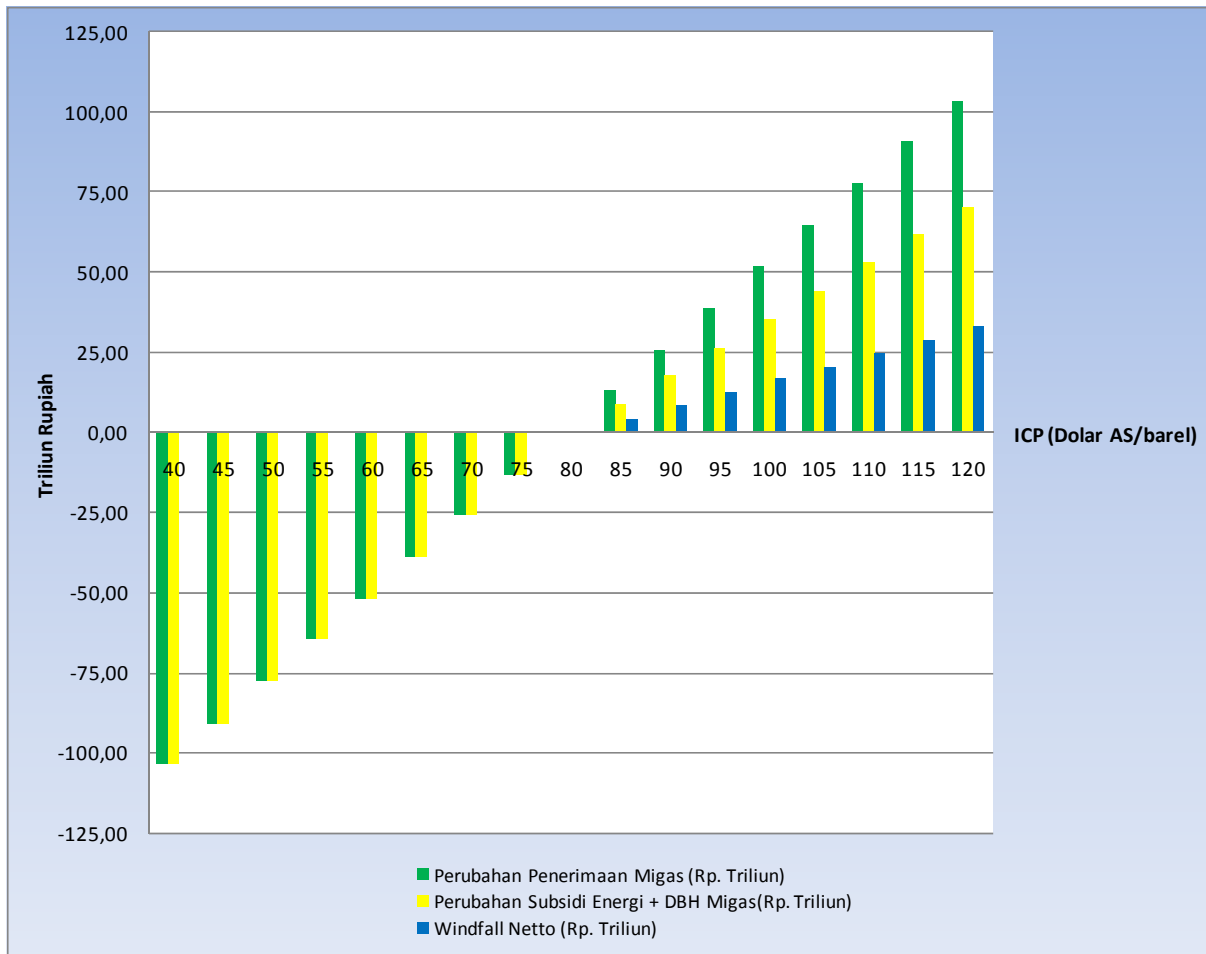
Simulasi perhitungan ReforMiner Institute

Catatan: Meskipun menggunakan acuan asumsi makro APBN 2011 yang sama, hasil perhitungan dapat berbeda dengan hitungan pemerintah karena penggunaan dan pengolahan data-data mikro yang berbeda. Data mikro dan pengolahannya yang berbeda diantaranya dapat meliputi acuan harga keekonomian untuk masing-masing jenis BBM (Mid Oil Platts Singapore, MOPS), harga rata-rata gas, penerimaan minyak dari Domestic Market Obligation (DMO).

Secara grafis, perhitungan harga keekonomian dan harga berlaku untuk premium, solar, dan minyak tanah dari simulasi perhitungan ReforMiner Institute tersebut adalah sebagai berikut:



Sedangkan dampaknya terhadap APBN ditunjukkan dalam grafik berikut:



Dari tabel dan grafik di atas ditunjukkan bahwa pada tingkat ICP 80 dolar AS per barel hingga 120 dolar AS per barel, harga berlaku premium akan bergerak di kisaran Rp. 4.500 per liter – Rp. 6.520 per liter, solar Rp. 4.500 per liter – Rp. 6.525 per liter, minyak tanah Rp. 2.500 per liter – Rp. 3.630 per liter (persentase terhadap harga keekonomiannya masing-masing konstan pada angka 65,59% (premium),

64,31% (solar) dan 36,41% (minyak tanah)). Pada rentang harga ini, *windfall netto* yang dapat dinikmati adalah sebesar Rp. 0 hingga Rp. 33,3 triliun.

Pada tingkat ICP di bawah 80 dolar AS per barel, harga premium dan solar akan lebih rendah dibandingkan harga saat ini (Rp. 4.500 per liter), dengan besaran penurunan harga yang berbanding lurus dengan penurunan ICP yang ada. Pada tingkat ICP dibawah 80 dolar AS per barel ini, kebijakan yang ReforMiner Institute usulkan pada prinsipnya adalah hanya membuat agar dampak pergerakan harga minyak mentah bersifat netral pada APBN (perubahan penerimaan migas sama dengan perubahan subsidi energi ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas). Dengan membuat dampaknya menjadi netral, maka dalam kebijakan ini dapat dikatakan negara tidak “mengambil untung” dari penurunan harga minyak, tetapi negara konsisten memberikan subsidi BBM kepada masyarakat dengan menurunkan harganya. Kebijakan yang juga ReforMiner Institute usulkan pada tingkat ICP dibawah 80 dolar AS per barel adalah dengan menjaga harga minyak tanah pada batas bawah Rp. 2.500 per liter dan menurunkan harga premium dan solar dengan besaran tertentu yang memberikan dampak netral pada APBN. Penetapan batas bawah harga minyak tanah ini diperlukan karena karena selisih harga berlaku dengan harga keekonomiannya saat ini masih terlalu jauh.

Pola kebijakan yang sama dapat diterapkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya dengan mengunci terlebih dahulu besaran persentase alokasi anggaran subsidi BBM terhadap belanja negara total. Dengan parameter volume BBM subsidi yang akan selalu meningkat dari tahun ke tahun, dengan mengunci persentase alokasi anggaran subsidi BBM pada angka tertentu, maka persentase harga BBM subsidi terhadap harga keekonomiannya dengan sendirinya akan menyesuaikan. Dengan kata lain, melalui kebijakan ini, disamping tiga manfaat utama yang dikemukakan di atas, harga keekonomian BBM ke depannya juga akan dapat dicapai secara bertahap relatif tanpa adanya *shock* kenaikan harga. Sebagaimana diketahui, harga keekonomian BBM penting diberlakukan untuk mendorong berkembangnya energi alternatif lain seperti bahan bakar gas dan bahan bakar nabati. Dengan menerapkan kebijakan harga BBM subsidi berfluktuasi ini, APBN dan perekonomian nasional secara keseluruhan diharapkan dapat “terbebas” dari ancaman gejolak harga minyak dan ke depannya dapat menjadi lebih sehat.

Jakarta, 20 Maret 2011

ReforMiner Institute

Media kontak:

Pri Agung Rakhmanto, Ph.D

Direktur Eksekutif

0812 8111 3006